

## KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM PENGURUS KOHATI BADAN KOORDINASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM JAWA TIMUR PERIODE 2018-2020

Uci Shintia Budi

(S-1 PPKn, FISH, UNESA) ucishintiabudi@gmail.com

Warsono

(PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan konstruksi kesetaraan gender pengurus KOHATI Badan Koordinasi (Badko) HMI Jatim Periode 2018-2020. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu: ketua umum, ketua bidang kajian dan advokasi, wakil sekretaris umum pendidikan dan latihan, anggota departemen pengembangan sumber daya organisasi. penelitian menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Fokus pada penelitian ini adalah pandangan pengurus KOHATI Badko HMI Jatim terhadap kesetaraan gender. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus KOHATI mengonstruksikan kesetaraan gender adalah hak dan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan pada ruang publik dan domestik tanpa meninggalkan nilai agama. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger yang menjelaskan bahwa konstruksi sosial muncul melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

**Kata Kunci:** Kesetaraan gender, Konstruksi, KOHATI

### Abstract

*The purpose of this study is to study is describe the construction of gender equality for the KOHATI management of the East Java HMI Coordinating Board (Badko) for the 2018-2020 period. This research uses a qualitative approach with a constructivism approach. There were four informants in this study, namely: the general chairman, the head of the field of study and advocacy, the deputy general secretary of education and training, members of the organizational resource development department. this research uses informant selection technique with purposive sampling. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews, observation and documentation. As for the validity technique using source triangulation and technical triangulation. The focus of this research is the view of the KOHATI Badko HMI on gender equality. The results of this study indicate that KOHATI administraros construct gender equality as equal rights and roles between men and women in public and domestic without leaving religious values. This study uses the social construction theory of Peter L. Berger which explains that social construction arises through three processes, namely externalization, objectivation, and internalization.*

**Keywords:** Gender equality, Construction, KOHATI

### PENDAHULUAN

Di lingkungan masyarakat terdapat berbagai nilai dan norma, adanya suatu nilai dan norma yang dipegang di situlah melahirkan suatu konsensus, salah satu hasil dari konsensus adalah gender. Menurut Lerner (Dalam Ardaniah, 1993:2) gender adalah pengaplikasian tingkah laku sesuai dengan jenis kelamin di suatu masyarakat yang dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Mosse (1996:3) bahwa gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada individu terkait pada feminine atau maskulin. Berbeda dengan seksual yang bersifat kodrati dengan ciri fisik yang jelas dan tidak dapat ditukar, sedangkan gender yang dapat dapat ditukar dan tidak bersifat kodrati.

Gender berpangkal pada perbedaan jenis kelamin, tetapi gender juga merupakan konstruksi sosial atau

konsensus pada wilayah atau budaya tertentu. Namun kenyataannya sebagian besar orang menafsirkan bahwa gender sebagai kondrat Tuhan yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditukarkan. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan nilai-nilai patriarkhi dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah Madura (koran Madura, 2017, Oktober 2).

Kecenderungan perempuan yang beraktivitas di lingkup sempit dapat mempertahankan budaya patriarkhi. Kecenderungan tersebut terjadi berawal dari perempuan dipaksa untuk menerima ideologi feminine di lingkungannya (dalam Thornham, 2010:68). Sehingga terjadi ketidakadilan gender yang diterima oleh perempuan. Terdapat lima bentuk ketidakadilan gender yakni: (1) Marginalisasi yaitu proses menyisihkan gerak perempuan pada bidang ekonomi yang mengakibatkan

kemiskinan, (2) Subordinasi yaitu pandangan dan tindakan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, (3) Stereotipe yaitu pembakuan peran yang seolah-olah tidak dapat dirubah yang mengakibatkan ketidakadilan gender, (4) Kekerasan yakni serangan fisik dan psikis terhadap perempuan, (5) Beban kerja yaitu tanggung jawab ganda yang dibebankan kepada perempuan pekerja (kemenppa, 2020).

Kesadaran guna menciptakan kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan sejak dini, karena melihat dampak dari patriarki yang merugikan ruang gerak perempuan. Maka upaya untuk memulainya pada masyarakat yang mulai modern namun cara pandang gender yang belum seimbang, perlu adanya suatu langkah pemberdayaan. Langkah pemberdayaan dapat dilakukan melalui jalur perorganisasian dan pendidikan (Saptandari, 2000:289). Dengan mempelajari gerakan perempuan maka dapat memberikan suatu gambaran yang relatif unguh tentang kiprah perempuan dalam memperjuangkan dirinya.

Pendidikan itu salah satu indikator keberhasilan untuk kesetaraan gender. Tuntutan kualitas pendidikan kesadaran gender pun seimbang dengan semakin majunya pembangunan ekonomi dan sosial (Karnia, 2015:23). Selain pemberian stimulus pada ruang pendidikan secara merata, perlu strategi untuk memaksimalkan pemberian pendidikan gender pada kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang dipercayai sebagai *agent of change*, yang memiliki pola pikir kritis (Febrianto, 2016:26). Maka hal yang wajar jika banyak organisasi kemahasiswaan yang tumbuh subur, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak pada bidang ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Dengan tujuan seperti itu maka dalam organisasi HMI memiliki suatu lembaga khusus keperempuanan sebagai bentuk keseimbangan ruang gerak perempuan secara *public*, lembaga tersebut bernama Korps HMI-Wati atau disingkat menjadi KOHATI. Menurut Saptari (2000:290) organisasi keperempuanan merupakan strategi yang penting dalam memecahkan suatu masalah, perempuan yang masuk organisasi setidaknya terdapat dua tujuan yakni: (1) Mencari pemecahan persoalan, (2) Mempunyai unsur kesadaran.

KOHATI merupakan lembaga khusus dari HMI yang bergerak pada bidang keperempuanan (Hasil Musyawarah Nasional (Munas) KOHATI Ke-XIII, 2018:40). Tujuan dari KOHATI adalah terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita (Hasil Munas KOHATI ke XXIII Anggaran Dasar pasal 3, 2018:39). Dengan perkembangan zaman mengakibatkan permasalahan perempuan di masyarakat semakin kompleks maka kader HMI-Wati

dituntut memiliki daya kualitas dan kapabilitas dalam merespon masalah keperempuanan sehingga watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual dan kemampuan profesional dan mandiri.

Di KOHATI terdapat tingkatan provinsi yang bernama Badan koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan KOHATI Pengurus Besar (PB) HMI, Badko berfungsi mengkoordinir KOHATI HMI cabang di wilayah kerjanya sebagai tindak lanjut pendelegasian kewenangan KOHATI PB HMI. Badko HMI memiliki tugas dan wewenang pada pasal 24 AD HMI hasil-hasil kongres XXX di Ambon 14-25 Februari 2018.

Pada penelitian ini memilih tingkatan Badko karena perpanjangan tangan dari Pengurus Besar HMI, Badko memiliki tugas salah satunya melaksanakan dan mengembangkana kebiaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasinya di wilayahnya dan meminta laporan perkembangan cabang-cabang dalam wilayah koordinasinya. Adapun cabang yang dikoordinatori oleh KOHATI Badko HMI Jatim adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Nama-nama KOHATI Cabang se Jawa Timur

1.	Surabaya	10.	Sumenep
2.	Malang	11.	Bondowoso-Situbondo
3.	Blitar	12.	Tulungagung
4.	Pacitan	13.	Banyuwangi
5.	Bangkalan	14.	Pamekasan
6.	Ponorogo	15.	Kediri
7.	Tuban	16.	Jember
8.	Probolinggo	17.	Bojonegoro
9.	Pasuruan		

Sumber: <https://instagram.com/kohati.jatim?igshid=1flk9bz5shusn> (diakses pada 17 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kesetaraan gender dalam pengurus KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yang memberikan asumsi dasar terkait dengan intersubjektivitas dalam konstruksi realitas sosial. Konstruksi realitas sosial dapat dilihat dengan 3 (tiga) momen dialektika yaitu *ekternalisasi*, *objektivasi*, *internalisasi*. Dengan melihat disetiap momen akan memperlihatkan bagaimana makna atau realitas sosial tersebut dikonstruksikan.

Konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger menyatakan bahwa keberlangsungan dalam dialektika

melewati tiga proses momen simultan yakni *eksternalisasi*, *obyektivasi* dan *internalisasi*. Dalam ketiga proses tersebut menjelaskan bagaimana penyesuaian diri dengan dunia *sosio-culture* sebagai manusia. Interaksi yang terbuka antara individu dengan sebuah kesepakatan masyarakat atau kesepakatan yang dibuat oleh lembaga yang terlegitimasi. Sehingga individu tersebut mengidentifikasi dirinya di dalam lembaga sosial atau organisasi sosial.

Pertama, *eksternalisasi* merupakan adaptasi dengan dunia *sosio-culture* sebagai produk manusia. Artinya dalam teori ini mengkonstruksikan bahwa *bergereksternalisasi* merupakan bentuk dari adaptasi individu dengan budaya-budaya yang berada di masyarakat. Proses ini di masyarakat sering disandingkan dengan interaksi sosial, karena kegiatan tersebut memberikan penyesuaian diri terhadap individu yang membangun interpretasi dalam masyarakat. misalnya, Dalam kader KOHATI yang berpedoman *value* di dalam masyarakatnya disandingkan dengan pengetahuan gender di dalam PDK dan pengalamannya di dalam organisasi KOHATI.

Kedua, *obyektivasi* merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang sudah dilembagakan atau mengalami proses institusional. Terdapat proses pembiasaan yang merupakan langkah awal dari pelebagaan atau proses pembudayaan. Masyarakat digambarkan menjadi *subyektif* dan manusia mengonstruksikan kodratnya sendiri. Misalnya adalah pemberian makna kepada perempuan yang memiliki peran dan pekerjaan harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, seperti urusan di domestik (mengurus anak, membersihkan rumah, mengurus dapur yakni memasak dan mencuci piring) dan tidak ikut andil dalam keputusan yang berada di luar rumah.

Ketiga, *internalisasi* merupakan proses nilai general atau realitas objektif dipelajari kembali oleh individu dan dijadikan sebagai bagian dari hidupnya. Hal ini menyangkut identifikasi diri individu ke dalam relitas objektif, untuk mencapai taraf tersebut maka individu secara terus menerus berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan dan budayanya. Ahasil kaum perempuan dibentuk sebagai suatu pribadi dengan identitas yang dikenal secara subjektif sekaligus objektif.

Pada proses pengidentifikasi dalam penelitian ini adalah pandangan pengurus KOHATI badko HMI Jatim periode 2018-2020 terhadap kesetaraan gender. KOHATI menjadi agen sosialisasi secara primer atau sebagai subjek penting dalam urusan akademik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan konstruktivisme

adalah menggali beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain (Patton, 2002:96-97). Dalam penelitian ini, setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian membutuhkan informasi yang sifatnya mendalam dari subjek. Selain itu, penelitian kualitatif yang diterapkan peneliti dirasa fleksibel pada keadaan subjek selama proses penelitian berlangsung. Menurut Cresswell (2016:44) penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menyelidiki masalah sosial atau masalah manusia dimana penelitti membangun gambaran yang kompleks dan bersifat holistik dengan menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan melakukan penelitian yang situasinya ilmiah (natural). Pada akhir penelitian ini menghasilkan struktur atau kerangka yang fleksibel.

Desain penelitian yang sengaja dipilih adalah desain penelitian konstruktivisme. Desain penelitian ini sengaja dipilih karena dengan menggunakan desain penelitian ini akan membantu peneliti dalam memahami berbagai situasi sosial dalam masyarakat. Situasi tersebut adalah berupa pengalaman subjektif informan terkait dengan konstruksi kesetaraan gender pengurus KOHATI Badko HMI Jatim 2018-2020.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menjabarkan konstruksi gender pengurus KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020. Menurut Mar'at dalam (Rifa'I, 2009:22) konstruksi adalah pandangan seseorang berasal dari komponen kognisi. Manusia mengamati suatu objek psikolog dengan paradigmanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikolog dapat berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu.

Konstruksi tersebut dilihat dari, pertama, pandangan individu yang mencakup dari pengetahuan dan pengalaman tentang gender. Dalam pengetahuan terdapat substansi pengetahuan yakni pemahaman yang didapatkan individu dari prespektif gender dan kesetaraan gender yang diperoleh dari dunia *sosioculture* tentang gender, pemahaman yang didapat individu dari dalil-dalil ayat suci tentang kesetaraan gender. Pada pengalaman terdapat sustansi pengalaman yakni proses belajar dari sosialisasi, proses belajar dari rangkaian kegiatan, pemikiran terhadap fenomena.

Kedua, dari tanggapan kesetaraan gender sebagai tindakan praktis. Tanggapan negatif dan pandangan positif meliputi tanggapan mendengar, berbicara, menganalisis terhadap kesetaraan gender baik di bidang kebijakan dan organisasi. Sedangkan tindakan praktis meliputi membuat kegiatan, menyelesaikan perkara isu

kesetaraan gender yang dilakukan oleh KOHATI yang merupakan lembaga khusus perempuan dari HMI.

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek dari penelitian. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan itu adalah: (1) Pengurus KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020, (2) Aktif menjadi kader minimal 3 tahun yang bergerak pada KOHATI, (3) Sudah lulus pada pelatihan minimal LK II/*Intermediate Training* dan Latihan Khusus Kohati (LKK). Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang memahami berjalannya roda organisasi dan juga duduk pada kekuasaan yaitu Ketua Umum yaitu Nur Suci Romadliyah, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi (Kabid KAVO) yaitu Ana Nur Janna, Wakil sekretaris umum Pendidikan dan Latihan (Wasekum DIKLAT) yaitu Sisilia Musafiana, Anggota departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) yaitu Wike Wijayanti.

Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Di dalam mengumpulkan data memerlukan cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Pada penelitian mendapatkan dua sumber penelitian yaitu primer dan sekunder, sumber primer ini adalah observasi awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bertanya langsung terkait konstruksi pergerakan KOHATI Badko HMI Jatim 2018-2020. Sedangkan sumber data sekunder adalah berasal dari buku, jurnal dan naskah akademik yang memuat tentang konstruksi kesetaraan gender sebagai penunjang penelitian. Sedangkan dari sisi cara yakni lebih banyak dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koprs HMI-Wati adalah badan semi otonom dari Himpunan Mahasiswa Islam yang bergerak pada bidang keperempuanan. Memiliki tujuan menciptakan kualitas individu itu sendiri sehingga setiap kader memiliki sumbangsih yang tepat terhadap masyarakat. Organisasi ini mempunyai tujuan yaitu terbinanya muslimah berkualitas insan cita, pada tujuan kualitas insan cita tersebut terdiri atas kualitas insan akademis, kualitas insan pecepta, kualitas insan pengabdian, kualitas insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dengan adanya tujuan tersebut maka menuntut setiap kadernya untuk menjalankan peranan dengan baik. Maka dengan itu, perlunya meningkatkan kualitas diri sehingga memiliki

watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual, kemampuan profesional serta kemandirian dalam merespon dan mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan di dalam masyarakat.

Di dalam organisasi yang terbilang modern dan memiliki tujuan untuk bersumbangsih kepada permasalahan wacana perempuan. Maka pengasahan pengetahuan, kesadaran dan tindakan perlu dilakukan dengan terorganisir. Ketua KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020 yaitu Suci Romadliyah menekankan bahwa KOHATI yang bergerak pada bidang keperempuanan dengan pandangan masyarakat yang cukup patriarkhi perlu adanya sebuah pemahaman dan gerakan yang terorganisir. Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara pada 15 September 2020 yang menyatakan,

“Di era yang semakin modern dan permasalahan yang semakin kompleks tetapi masyarakat secara sosial ini masih mempunyai pandangan yang konservatif terhadap perempuan. Pandangan tersebut bisa berubah dengan perempuan berikhtiar mengkuilatkan dirinya. Bertindak yang tidak menyeleweng dari nilai agama dan Pancasila.”

Senada dengan pernyataan Ana pengurus KOHATI Badko Jatim periode 2018-2020 yang menduduki Kabid KAVO,

“Ya mbak, dengan berorganisasi itu kita bisa mengkuilatkan diri disisi pengetahuannya sehingga melahirkan sebuah tindakan yang tepat. Ya contohnya di KOHATI ini yang organisasi perempuan, wadah untuk perempuan diasah secara *soft skill* dan *hardskill*. Jadi saat mereka telah lulus di bangku kuliah bisa bersaing dengan laki-laki di dunia kerja dan bisa diajak dalam menyelesaikan permasalahan negara.” (wawancara 22 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa KOHATI memiliki tujuan untuk meningkatkan kapabilitas setiap kader yang nantinya bersumbangsih kepada negara. Harapannya setiap tindakan yang dilakukan oleh kader dengan tepat dan bijak, artinya masih sesuai dengan etika, nilai agama dan Pancasila yang menjadi dasar negara.

Hadirnya nilai patriarkhi yang masih mengakar dan memberikan sebuah dampak yang signifikan, menuntut seorang perempuan yang mendapatkan sebuah pendidikan dan berorganisasi. Tujuan tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. permasalahan adanya nilai tersebut dapat terpecahkan dengan adanya sebuah pandangan yang sama dan pemberlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. pembelakuan yang sama itu artinya seorang laki-laki dan perempuan dapat memiliki sebuah kebebasan untuk mengembangkan potensi dan memutuskan sebuah pilihan tanpa adanya seperangkah *stereotype* dan nilai peran gender yang kaku.

Sebuah pandangan dan tindakan tersebut biasanya disebut dengan kesetaraan gender. Strategi kesetaraan gender di dalam organisasi harus terstruktur, sistematis dan kolektif. Maka diperlukannya mengetahui kesetaraan gender dari organisasi tersebut. sebuah konstruksi kesetaraan ini dapat dilihat dengan tiga hal yaitu (1) Pengetahuan gender dan kesetaraan gender pengurus KOHATI Badko HMI Jatim 2018-2020, (2) Kesadaran gender Pengurus KOHATI Badko HMI Jatim 2018-2020, dan (3) tindakan praktis kesetaraan gender Pengurus KOHATI Badko HMI Jatim 2018-2020.

### **Pengetahuan Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki**

Pemikiran individu tidak terbentuk dengan sendirinya, terdapat sebuah variabel yang mempengaruhi adanya sebuah pemahaman misalnya didapat melalui tahap sosialisasi, psikomotitik dan intuitif. Termasuk dari adanya pengetahuan tentang gender yang merupakan sebuah hasil dari konsensus terkait dengan peran dan tanggungjawab yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Peran dan tanggungjawab tersebut didasari atas jenis kelamin, nilai agama, budaya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Suci Romadliyah selaku Ketua Umum KOHATI Badko HMI Jatim Periode 2020 tentang gender,

“Gender itu adalah konstruksi sosial budaya. Perilaku yang didapatkan untuk relasi antara laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam masyarakat yang biasanya dikenal dengan budaya gender. Konstruksi yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan dapat berubah-ubah, dinamis dan modifikasi terus sesuai dengan zaman, artinya sesuai dengan kondisi yang ada.” (wawancara tanggal 15 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pengetahuan tentang konsep dasar gender mengandung sebuah peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan. Pada peran tersebut juga dipengaruhi oleh fenomena sosial budaya pada masyarakat, artinya di dalam sebuah konsensus tersebut didasari atas adanya jenis kelamin, agama, dan budaya. Maka perlu adanya sebuah pemahaman tentang konsep gender dan juga konsep seks karena akan berpengaruh pada relasi gender yang ada di masyarakat. Karena di dalam seks akan membahas sebuah biologis yang akan berpengaruh kepada atribut yang diberikan kepada perempuan yaitu feminine dan laki-laki yaitu maskulin. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Anna selaku kabid KAVO,

“Iya, ada hubungan antara seks dengan gender itu. Hubungan tersebut ya menghasilkan sebuah pandangan sikap antara laki-laki dan perempuan. Misalnya nih, perempuan cenderung sifatnya lebih keibuan seperti lembut, kasih sayang, cerewet, mengayomi. Sedangkan laki-laki identikan dengan

sifat yang tegas, keras, kuat..” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa jenis kelamin juga menjadi variabel yang mempengaruhi adanya atribut yaitu sifat yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Adanya atribut tersebut juga akhirnya berdampak kepada penuntutan karakter yang dianggap ideal oleh masyarakat. Hal tersebut juga dilanjutkan oleh Anna,

“... ya adanya sifat-sifat tersebut akhirnya dianggap sifat yang ideal, yang sempurna. Sehingga saat misalnya kita keluar dari sifat yang sesuai dengan jenis kelamin maka akan dianggap tidak benar atau menyalahi kodrat budaya. Padahal sifat-sifat tersebut sebenarnya dimiliki kok oleh setiap manusia. Contohnya apakah laki-laki tidak pernah menangis? Pastilah menangis saat dia dititik jenuh, saat mengalami kehilangan dan apakah hal tersebut lalu dianggap menyalahi kodrat. Saya rasa tidak, tetapi banyak sebagian orang yang memaksimalkan usahanya untuk membatasi ekspresinya sampai kadang *stress*.” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberian label sifat ideal yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki memberikan dampak. Kalimat kodrat selalu disangkut pautkan dengan sifat yang ditunjukkan, sehingga menuntut perempuan dan laki-laki bersifat sesuai dengan sikap-sikap yang dianggap ideal tersebut. Hal itu juga akan berpengaruh pada psikologis manusia karena tuntutan sikap-sikap tersebut. Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan Sisil selaku wasekum DIKLAT menyatakan,

“Iya seperangkat peran yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan itu hasil dari pertimbangan sifat maskulin dan feminine yang sebenarnya hasil juga dari kesepakatan masyarakat. Padahal sifat-sifat itu bisa dimiliki oleh keduanya. Hal-hal yang selama ini berbau perempuan seperti mengelola dan merawat kebersihan, mendidik anak dan urusan rumah tangga itu dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal itu hasil dari dominasi kekuatan dan kekuasaan maskulin. Urusan-urusan tersebut dapat juga dapat dilakukan oleh laki-laki.” (wawancara tanggal 29 September 2020)

Dari adanya sebuah pendikotomian sifat tersebut, berdampak kepada peran yang diemban. Terdapat pendikotomian ruang lingkup kinerja dari perempuan dan laki-laki. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wike selaku anggota departemen PSDO,

“Di masyarakat yang memegang erat budaya atau nilai patriarki, maka ruang gerak yang diberikan ya oleh laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Maksudnya laki-laki diberikan ruang pada dunia publik, sedangkan perempuan hanya pada ruang domestik. Contohnya, laki-laki boleh

bekerja sedangkan perempuan tidak, laki-laki dominan menempati posisi yang strategi sedangkan perempuan tidak, laki-laki setelah bekerja langsung tidur dan tidak mau tau tentang urusan rumah, sedangkan perempuan saat sepulang dari bekerja mereka harus membersihkan rumah dan mengurus anak.” (wawancara 20 September 2020)

Adanya sebuah dikotomi hal tersebut menghambat sebuah sumbangsih perempuan kepada dunia publik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sisil yang menyatakan, “Adanya pandangan yang salah dengan gender akan berdampak kepada ruang gerak perempuan kepada dan laki-laki. Karena terdapat sebuah relasi kuasa yang tidak seimbang. Karena perempuan dianggap lemah dan lingkup kerjanya pada domestik atau rumah, maka perempuan cenderung kena dampak dari ketidakadilan gender. Contohnya banyak perempuan sering terkena kekerasan.” (wawancara tanggal 29 September 2020)

Kereliasian gender tersebut akan berdampak besar kepada sebuah keadilan gender yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Suci tentang kesetaraan gender menyatakan,

“Gender berkaitan dengan peran individu dalam kehidupan sosial masyarakat. dan kesetaraan gender itu juga wajib perlakuan yang sama kepada setiap individu karena akan menentukan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Perlakuan sama tersebut dapat dilihat dari kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang di masyarakat.” (wawancara tanggal 15 September 2020)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahwa gender itu diberlakukan tanpa memandang dia laki-laki maupun perempuan, dan di dalam sebuah hukum pun tidak menjelaskan hukum itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.

Pada perbincangan dengan Suci Romadliyah, Wike dan dua informan pada umumnya sudah memahami dan mengenal adanya sebuah urgensi pemahaman konsep dasar gender yang berdampak kepada kesetaraan gender. Pengimplementasian kesetaraan gender untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia dapat diterapkan dengan menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif disegala kehidupan, menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan

atas perlindungan kesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang didasarkan atas inferior atau superior salah satu jenis kelamin. Dan mereka setuju adanya kesetaraan gender dalam bidang-bidang di masyarakat karena menurut mereka laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di ruang publik dan juga ruang domestik. Pengetahuan tentang kesetaraan gender menjadi perilaku kebiasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Peter L. Berger, bahwa individu hidup dalam kehidupannya mengembangkan suatu perilaku yang *repetitive* yang disebut dengan kebiasaan atau *habbits*.

### **Perempuan Memiliki Peluang menjadi Pemimpin**

Dalam melihat gender dalam kepemimpinan tidaklah lepas dari sebuah pengetahuan dan juga norma yang menjadi sebuah pijakan seseorang untuk berperilaku. Terdapat sebuah garis paralel dalam gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki terhadap sudut pandang masyarakat. Dimensi kepekaan gender memungkinkan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi personal, kepemimpinan dan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wike,

“Berbicara pada persoalan kepemimpinan merupakan sebuah kedudukan, maka di dalam sebuah kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dua kata tersebut tidak selalu identik sih. Orang yang mempunyai peranan belum tentu mempunyai kedudukan, sebaliknya orang yang memiliki kedudukan, juga belum memiliki peranan.” (wawancara 20 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa kedudukan dan peranan itu tidak dapat dipisahkan, begitupun dengan pembahasan tentang perempuan. dilanjutkan kembali oleh Wike,

“... kalau berbicara perempuan, perempuan sudah diberikan peran banyak di bidang pembangunan, tetapi kedudukan perempuan belum jelas. Posisi-posisi penting masih diduduki dan didominasi oleh laki-laki. Masih banyak alasan perempuan tidak diberikan posisi tersebut.” (wawancara 20 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat terdapat beberapa pandangan perempuan yang menyatakan bahwa sikap perempuan yang lemah, tidak tegas, emosional yang sering ditempelkan menjadi dasar anggapan bahwa ketidakmampuan perempuan mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin. Perempuan sangat diwarnai oleh *power within* yang mengandalkan kekuatan bersama dan gerak langkah bersama. Artinya penggerak dari sejumlah pemimpin global perempuan menggerakkan untuk mengedepankan sisi kemanusiaannya. Namun, anggapan tersebut tidak bisa sepenuhnya untuk

membatasi perempuan diranah publik untuk memimpin karena terdapat hak dasar dan hak warga negara yang bisa terlibat khususnya pada ranah politik. Hal itu juga diperkuat lagi oleh Anna yang menyatakan,

“Berbicara pada peluang perempuan dalam memimpin terdapat tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender itu adalah bagaimana membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan. hak-hak perempuan itu sudah ada memang sejak dulu namun, kurang memuaskan karena kita sebenarnya mengaharapkan kesadaran kolektif di dalam masyarakat itu.” (wawancara 22 September 2020)

Di dalam penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam membentuk kesetaraan gender pada tatanan masyarakat perlu adanya kesadaran kolektif terkait dengan kesetaraan gender. Misalnya kesadaran tersebut berbentuk menghormati hak perempuan baik itu dalam ruang publik dan ruang domestik atau keluarga. Selanjutnya juga diungkapkan kembali oleh Anna,

“Kesadaran kolektif tadi itu perlu memerlukan sebuah strategi. Dalam strategi itu adalah kita melakukan berbagai bentuk komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, berdasarkan sosiokultural maupun agama, tentang hak-hak perempuan dan pelanggaran terhadap perempuan di segala bentuk media.” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam memberikan sebuah kesadaran memerlukan sebuah strategi yaitu di dalam komunikasi, informasi, memberikan sebuah edukasi terkait dengan kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan di kalangan masyarakat. Serta memberikan sebuah hukuman terhadap seseorang yang melanggar dan membatasi hak perempuan baik itu di bidang apapun.

Partisipasi pada perempuan sangat dibutuhkan untuk kemajuan negara ini. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Suci,

“Ya kalau dilihat secara historis, kongres perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928 itu sudah menandai adanya kesadaran politik terhadap perempuan mulai tumbuh. Partisipasi perempuan pada ranah pengambil kebijakan sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender di masyarakat. karena dampak dari kebiasaan gender itu berdampak signifikan, seperti diskriminasi pekerja perempuan, pelecehan seksual, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan hukum yang masih bias gender.” (wawancara 15 September 2020)

Dari penjelasan Suci dapat dikemukakan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan sudah sejak lama dilakukan, namun kesetaraan dalam relasi manusia ini belum mencapai tahap ideal. Maka perempuan perlu memberikan sumbangsih dengan cara

mengimplementasikan emansipasi perempuan diberbagai bidang pada ruang publik.

Melihat bahwa kesempatan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam ranah kepemimpinan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sisil menyatakan,

“Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam aspek apapun di masyarakat. baik itu di bidang sosial, politik, hukum, pendidikan, pertahanan dan keamanan semuanya sama. Bahkan dalam kepemimpinan pun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Karena saat mempelajari sikap-sikap pemimpin kita tidak mendikotomikan perempuan begini harusnya saat memimpin dan laki-laki harus begitu saat memimpin. Hal yang penting dalam kepemimpinan misalnya pokok amanah dan mementingkan kepentingan bersama bukan individu yang dibawa. Kalau di dalam agama perempuan dan laki-laki itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu hanya akhlak dan ketakwaannya, seberapa jauh istiqamah dalam iman dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya.” (wawancara 29 September 2020)

Penjelasan tersebut menyatakan dapat dikemukakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di aspek apapun di masyarakat. dalam hal ini perempuan dianggap mampu untuk segala permasalahan dalam memimpin sebuah organisasi. Selain adanya kedudukan gender yang sebenarnya sama, adapun juga terkait dengan sifat pemimpin antara lain: (1) Visioner, (2) jujur, (3) cerdas, (4) *responsible*, (5) disiplin berperilaku, (6) Disiplin administrasi, (7) disiplin monitoring. Dalam sifat-sifat kepemimpinan pun tidak mendikotomikan sifat mana yang harus dilakukan perempuan ataupun laki-laki. Maka di sini artinya perempuan dan laki-laki pun memiliki kesempatan yang sama dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Hal itu juga diperkuat lagi dengan ungkapan Anna yang menyatakan,

“Terkait dengan kepemimpinan laki-laki dan perempuan itu sama karena laki-laki dan perempuan adalah manusia dan manusia itu merupakan *kholifah fil ard*. Jika dua-duanya memiliki kemampuan yang bagu, boleh saja perempuan itu menjadi pemimpin. Di negara Indonesia yang negara adalah hukum ya, tidak ada aturan dalam kepemimpinana negara semisal saat ingin menjadi peserta pemilu yang membatasi pemimpin di negara atau daerah harus laki-laki. Toh di beberapa daerah di Indonesia juga ada pemimpin yang perempuan. Dan dalam melaksanakan kememimpinannya juga bagus dan tegas.” (wawancara 22 September 2020).

Pada penjelasan tersebut juga dapat dikemukakan bahwa pengurus KOHATI Badko HMI Jatim sepakat bahwa sifat kepemimpinan tidak melihat seks tapi melihat kapasitas dari individu tersebut. Walaupun

Indonesia juga masih memegang nilai patriarki tapi masyarakat yang intelektual seperti mahasiswa mampu memberikan suatu pandangan bahwasannya dalam konteks keluarga memang laki-laki menjadi imam tetapi dalam ruang publik perempuan dan laki-laki adalah setara. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Suci yang menyatakan,

“Dalam konteks kehidupan berkeluarga agama yang saya yakini, tentu berbeda peran kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Laki-laki tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Berbicara pada konteks publik khususnya kepemimpinan pada sisi kesempatan hak, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin. Dilihat pada sisi peluang perempuan dan laki-laki juga berpeluang untuk memimpin. Bagaimana perempuan dan laki-laki dalam menyelesaikan masalah dan menghargai yang dipimpin. Artinya peluang dalam memimpin adalah moralitas dan kapasitas yang dilihat.” (wawancara tanggal 15 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwasannya pengurus KOHATI Badko HMI Jatim menyepakati adanya suatu pandangan yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang sudah menjalin hubungan suami istri atau berkeluarga maka konteksnya laki-laki adalah pemimpin. Namun, pada konteks masyarakat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas di ruang publik. Dalam kepemimpinan pun yang dilihat adalah moralitasnya baik itu laki-laki dan perempuan, bagaimana menjalankan tugas dan tanggungjawab sosial serta dapat melakukan gotong royong yang dianutnya.

Walaupun secara ideal kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, dalam konteks kepemimpinan yaitu laki-laki dan perempuan juga memiliki kesempatan yang sama. Namun, pada implementasinya terdapat sebuah faktor yang menghambat terjadinya sebuah keadilan gender. Faktor tersebut ada yang berasal dari luar diri perempuan, terdapat beberapa bidang masih memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki seorang perempuan. Terdapat pernyataan dari Wike yang menyatakan,

“.. masih ada di beberapa bidang publik yang masih belum lo memberikan peluang kepada perempuan di dalam ranah memimpin. Di dalam ruang kerja, misalnya perempuan hanya pada tahap teknis produksi tapi pada hal pemasaran, dan informasi terkait strategi peningkatan kualitas identikan dengan laki-laki. Artinya, pembagian kerja di dalam masyarakat masih berpandangan berdasarkan seks, bukan kemampuan dari pribadi diri manusia. Padahal kalimat adil disebut lebih dahulu karena memang pemerataan yang harus lebih didahulukan. Hal tersebut karena *stereotype* yang menempel kepada perempuan bahwa

perempuan menggunakan rasa daripada logika.” (wawancara 20 September 2020)

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa walaupun secara beberapa *value* menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, namun masih ada dalam praktiknya yang tidak memberikan *equality* terhadap perempuan. Contoh yang dijelaskan Wike adalah saat perempuan di dunia kerja, perempuan digaji murah karena pola pikir yang dihasilkan dari *stereotype* pada perempuan yang kurang cakap, terampil, dan di bawah tekanan. Hal lain juga disampaikan oleh Anna,

“Sebenarnya perempuan di dalam publik, banyak dari hasil beberapa pembangunan. misalnya di bidang pembangunan pertanian dan perkebunan banyak sumbangsih dari perempuan. Tapi pembangunan itu sendiri malah tidak ramah dan bersahabat buat perempuan. masih banyak ketidakadilan terhadap perempuan dimana-mana. Misalnya, pengambilan keputusan politik masyarakat masih didominasi laki-laki, keputusan di bidang politik itu sistem yang mengatur berjalannya keputusan yang bias gender dan merugikan perempuan. selain itu, ada perempuan diikat dengan peran gandanya, apabila ia mempunyai aktivitas di sektor publik.” (wawancara tanggal 20 September 2020)

Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa di beberapa bidang perempuan telah bersumbangsih namun di dalam pembangunan perempuan masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri. Terdapat pernyataan juga dari Sisil yang perempuan di dalam sebuah kepemimpinan,

“Di masyarakat yang masih memegang erat budaya patriarki itu memang masih mendeskripsikan perempuan, belum memberikan kesempatan seorang perempuan untuk berperan maksimal di ranah publik baik itu bekerja dengan layak dan menjadi seorang pemimpin. Karena masyarakat mendikotomikan berdasarkan seks bukan sebagai kemampuan pribadi manusia itu sendiri. (wawancara tanggal 29 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu penghambat juga saat perempuan menjadi pemimpin dan memaksimalkan perannya dalam dunia publik karena terjadi pembagian peran berdasarkan sebuah seks bukan berdasarkan kemampuan diri. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Anna,

“.. hadirnya perempuan yang profesional juga tidak jauh berbeda dengan tenaga perempuan yang tergolong un-skill. Baik di kalangan tidak terdidik maupun tidak terdidik, apresiasi terhadap perempuan masih saja berada di dalam stereotipe yang memperhatikan lo. Para perempuan sukar menjadi pemimpin, misalnya dia profesional berfungsi menjadi pekerja pembantu misalnya sekretaris, asisten manajer, dan tenaga

administrasi, bendahara.” (wawancara tanggal 22 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagian profesional di dalam perempuan itu pada ranah pekerja yang pembantu, misalnya sekretaris, asisten manajer, tenaga administrasi, dan bendahara. Penempatan profesi tersebut juga karena anggapan bahwa perempuan itu lebih *telaten*, teliti.

Selain terdapat sebuah tindakan dari luar diri perempuan menjadi seorang pemimpin, terdapat faktor yang menyebabkan perempuan juga memperhitungkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Hal sama juga disampaikan oleh Anna,

“Sampai saat ini, masih banyak perempuan Indonesia yang sudah puas dengan peranannya, tanpa mempersoalkan kedudukannya, sehingga saat perempuan sudah merasa puas maka ya perempuan itu tidak ada tindakan akan perubahan. Karena tidak merasa tertekan.” (wawancara tanggal 22 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa perempuan secara internal diri ada yang merasa puas terkait dengan perannya tanpa memperhitungkan bagaimana kedudukan penting di perempuan. sehingga perempuan hanya terbelenggu di dalam sebuah peran. Hal tersebut diungkapkan kembali oleh Anna bahwa.

“.. terdapat beberapa sikap yang sebenarnya melemahkan dirinya perempuan sendiri sebetulnya. Pertama, karena struktur budaya yakni stereotipe menyebabkan perempuan kesulitan untuk menghilangkan perasaan takut salah dan malu. Kedua, lingkungan yang menciptakan perempuan sebagai makhluk pemeliharaan yang melayani segala kebutuhan hidup, contohnya pada lingkungan keluarga membuat perempuan memiliki mental yang dependen. Ketiga, ambisi di dalam pribadi yang didorong emosi yang terkadang tidak terkendali, emosi tersebut dapat memicu persaingan yang tidak sehat di kalangan perempuan itu sendiri. Keempat, kurangnya perempuan untuk berani menerima kekuasaan, apalagi dalam merebut kekuasaan. Ketidakberanian tersebut karena hasil juga dari konstruksi masyarakat.” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan pernyataan Anna tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat juga faktor yang melemahkan perempuan itu sendiri padahal perempuan telah mendapatkan sebuah kesempatan. Terdapat empat yang disampaikan oleh Anna yaitu (1) perasaan yang takut salah dan malu, (2) mental yang dependen, (3) Ambisi yang seharusnya saling mendukung sesama perempuan malah menjadi sebuah persaingan tidak sehat atau saling menjatuhkan sesama perempuan, (4) Kurangnya keberanian perempuan di dalam sistem kekuasaan dan merebut kekuasaan. Hal-hal tersebut dikarenakan

ketidakdilan gender yang menyebabkan perempuan secara tidak langsung memberikan sebuah tindakan yang mendikotomikan dirinya sendiri. Perempuan menganggap ruang publik itu sesuatu yang didalamnya berisi sebuah pertarungan dan mempertahankan. Sehingga perempuan mendikotomikan dirinya tidak mampu mengekskspesikan dirinya jika disandingkan laki-laki. Kebalikannya, perempuan akan cenderung berani saat pada lingkungan yang sama-sama perempuan. Sehingga yang awalnya perempuan sesama perempuan harusnya berkolaborasi dengan sehat menjadi sebuah kompetisi yang tidak sehat. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Wike yang menyatakan,

“Ya akibat dari kurang pemahannya masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender. Yang dimana tidak sedikit lo pandangan stereotipe telah merasuk ke dalam mental perempuan-perempuan di daerah tertinggal, menyebabkan perempuan tidak mampu berpikir tajam dan jernih, sehingga kerap ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terkadang perempuan itu kurang menyadari akan kekuatan dirinya sehingga terkadang mencerung menciptakan dunianya sendiri yang tertutup karena merasa lebih aman. Nah, hal-hal beginilah yang terkadang membuat perempuan-perempuan di daerah tertinggal misalnya mengalami kesulitan untuk keluar dari belenggu budaya patriarkhinya.” (wawancara 20 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa perempuan yang berada di lingkungan tertinggal dengan budaya patriarkhi yang cukup kental akan menyebabkan pengetahuan yang dapat mempengaruhi mental dari perempuan dan laki-laki. Dari sisi laki-laki akan menganggap perempuan tidak dapat berpikir jernih jika disandingkan dengan sebuah permasalahan sehingga tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Dari sisi perempuan, karena adanya budaya patriarkhi seperti itu maka mempengaruhi pengetahuan dan mental perempuan sehingga mengdiskritkan dirinya pada hal-hal yang cenderung aman.

Dengan adanya pengetahuan yang cukup terhadap konsep kesetaraan gender maka perlu adanya sebuah kesadaran kesetaraan gender dalam sebuah organisasi yang bergerak pada keperempuanan maka dapat memecahkan persoalan intens tentang perempuan dan mempunyai unsur kesadaran terkait keperempuanan. Maka perempuan secara tidak langsung diberikan suatu kesempatan dalam implementasi dan juga mendapat pengetahuan dari anggota dalam organisasi, sehingga tujuan kesetaraan gender dapat dilakukan.

Di dalam menjalankan roda organisasi KOHATI juga terdapat struktur dalam organisasi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemimpinan dan kekuasaan. Mekanisme pengambilan keputusan kekuasaan dan kepemimpinan

diatur di dalam Pedoman Dasar KOHATI. KOHATI mempunyai konsep ideal dan menjadi tempat untuk perempuan meningkatkan kualitas juga disampaikan oleh Suci yang menyatakan,

“KOHATI itu wadah untuk *upgrade* kualitas dan kapabilitas kader HMI-Wati. Pengkualitas itu dimaksimalkan untuk nantinya dijadikan bekal kader HMI-Wati dalam mengimplementasikan kesetaraan peran di ruang yang lebih luas. Tapi dalam konteks kesetaraan kader HMI-Wati harus tetap dapat berkolaborasi dan berbagai peran dalam menjalankan organisasi HMI. KOHATI secara kelembagaan hanya memberikan legitimasi bahwa kader dapat bergerak di wilayah eksternal dengan organisasi perempuan lainnya.” (wawancara 30 September)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa KOHATI wadah untuk mengkualitas dan kapabilitas kader-kadernya baik secara pengetahuan dan implementasi kesetaraan gender. Karena di dalam pandangan pengurus KOHATI ini juga memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk memberikan sebuah sumbangsih kepada masyarakat. Di dalam roda kepemimpinan KOHATI, kader HMI-Wati secara independen melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi laki-laki dalam forum. Hal tersebut juga diungkap oleh Anna sebagai pengurus KOHATI menyatakan,

“Dalam pemilihan musyawarah KOHATI pun terdapat suatu prosedur yang pesertanya adalah perempuan dan kader HMI-Wati. Bahkan kalau semisal tidak terjadi sebuah mufakat kan dilakukan voting itu pun dilakukan oleh perempuan.” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa pengurus KOHATI juga secara sadar telah melakukan kesetaraan gender dalam musyawarah kepemimpinan. Kesadaran tersebut dilakukan karena juga melihat bahwa di masyarakat masih terdapat implementasi dari ketidakadilan gender yang berdampak kepada perempuan. Bahkan di dalam menjalankan roda organisasi baik secara hukum nya yaitu Pedoman Dasar Kohati terdapat mekanisme bagaimana pemilihan pimpinan KOHATI, pengurus KOHATI dan juga bagaimana menjalankan sebuah kepengurusannya sehingga menjadi organisasi yang mampu menjadi solusi untuk permasalahan gender.

### Upaya Objektif Kesetaraan Gender di dalam Organisasi

Tindakan praktis dalam kesetaraan gender merupakan proses internalisasi. Pada proses ini adalah adanya suatu penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif pada individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Tahap ini masyarakat diharapkan mampu

menghasilkan tindakan dari proses individu yang akan menjadikan pondasi adanya suatu pandangan dari struktur sosial. Sub tindakan praktis kesetaraan gender pada penelitian ini terdapat pada sisi internal kader HMI-Wati dalam mengimplementasikan pengetahuan kesetaraan gender.

Organisasi atau kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan merupakan sebuah suatu kekuatan. kekuatan tersebut dalam konteks perempuan adalah berupa bentuk kesetaraan gender. Terdapat beberapa tindakan yang dapat menjadi upaya untuk menciptakan kesetaraan dan berkeadilan gender. Hal tersebut disampaikan oleh Anna,

“Perubahan pola pikir (*mind set*) dari nilai-nilai androsentris, dimana memang sesuatu dari perspektif laki-laki yang menuju pandangan dan pola pikir berbasis gender itu perlu dibangun. Hal itu juga termasuk strategi menuju kesetaraan gender lo..” (wawancara 22 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam upaya penguatan dari keadilan dan kesetaraan dimulai dari perubahan pola pikir baik dari sisi perempuan dan laki-laki. Pandangan yang berprespektif laki-laki (endrosentris) dengan kesadaran akan kebutuhan dan pengalaman-pengalaman perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Hal itu juga disampaikan oleh Wike,

“Tantangan berat selama ini itu masih banyak keraguan di kalangan masyarakat tertentu, apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah publik karena ya terhaang tertentu beranggapan bahwa dunia publik itu adalah milik laki-laki. Padahal secara potensi kecerdasan laki-laki dan perempuan adalah sama.” (wawancara 20 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa pemikiran perempuan itu masih belum percaya diri dan ragu-ragu dengan potensi dirinya, pandangan tersebut karena perempuan menganggap bahwa ruang publik adalah milik laki-laki.

Perlu adanya sebuah tindakan kesetaraan gender merupakan bentuk dari pembangunan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap ruang publik agar perempuan mampu membangun kapasitas dan kapabilitas. Hal tersebut juga disampaikan oleh Suci,

“Pemberdayaan Perempuan itu adalah adalah peluang, peluang itu dapat terjadi dari diri sendiri dan juga dapat dari kelompok perempuan merupakan kekuatan, yang bila disadari menjadi potensi yang luar biasa. Keinginan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam masyarakat madani itu ya konsekuensinya kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan

yang mendukung.” (wawancara 15 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa sebuah tindakan pemberdayaan perempuan itu penting dilakukan. Karena pemberdayaan perempuan merupakan sebuah peluang kepada perempuan untuk mengembangkan pendidikannya, kemampuan berkomunikasi, pengembangan pengorganisasian. Anna juga mengungkapkan,

“Pemberdayaan perempuan itu penting karena memberikan sebuah pengetahuan, sehingga dari pengetahuan tersebutlah, perempuan dapat merasa menjadi pemimpin bagi pemikirannya sendiri. Perempuan akan mampu berdiskusi mengenai pikiran dan pandangannya tentang hidup secara jelas dan sesamanya. Perempuan akan mampu berani berpendapat yang bebas dan mampu memberikan tanggapan secara kritis.” (wawancara tanggal 22 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan itu penting karena akan mengubah pola pikir dari seorang perempuan yang awalnya terpengaruh dari budaya patriarki yaitu kurang luasnya dia mengekspresikan dirinya. Maka dengan adanya pemberdayaan perempuan akan menjadikan perempuan berdaya. Hal lain tentang pemberdayaan perempuan dari Suci,

“Untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender itu perlu adanya pemberdayaan perempuan, karena ya pemberdayaan perempuan itu akan meningkatkan kualitas diri terhadap perempuan untuk mengisi peran dan kedudukannya. Supaya perempuan menduduki kedudukan yang strategis. Cara yang digunakan yaitu ya sosialisasi tentang kesetaraan gender perempuan dan laki-laki, memperjuangkan hak dan menghapuskan bentuk kekerasan baik itu psikis, ekonomi, dan seksual.” (wawancara tanggal 29 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan bukan hanya saja memberikan pengetahuan secara teoritis namun juga memberikan sebuah stimulus dan strategi untuk memperempuankan mampu mengisi ruang-ruang penting dengan ramah perempuan. Adanya sebuah pemberdayaan perempuan ini bukan untuk menciptakan perempuan menjadi unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya kekuasaan, adapun untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih contoh dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Hal lain juga ditambahkan oleh Suci,

“Pemberdayaan perempuan dapat dibangun juga melalui *civic education*, pendidikan kewarganegaraan, kesetaraan gender, hak-hak politik perempuan, dan hak sipil semakin ditingkatkan. Hal tersebut dapat diberikan di

dalam kurikulum dari mulai tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Selain itu, pemberian itu juga dapat diberikan melalui penyuluhan, seminar atau forum ilmiah lalu menyebarkan nilai-nilai egaliter, dan kemandirian dalam kehidupan. Penyebaran itu guna memberikan pemahaman dan kesadaran HAM, maupun kesadaran gender sejak dini melalui jalur pendidikan formal dan informal.” (wawancara tanggal 15 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat dibangun melalui *civic education*, pendidikan kewarganegaraan, dan pemberian pengetahuan tentang hak-hak perempuan di kancah publik baik itu hukum, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dan pemberian tersebut dapat dilakukan diberbagai forum baik itu formal dan nonformal.

Saat pemberdayaan perempuan itu telah menciptakan sebuah keadilan dan kesetaraan gender maka akan membentuk kesadaran diri perempuan akan mempunyai otonom atas tubuhnya sendiri dan dirinya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh wike,

“Perempuan yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tinggi dan pro terhadap gender maka dia akan memiliki sebuah kemandirian atau otonom atas dirinya sendiri. Maka perempuan dapat mengukur besar kecilnya otonomi dirinya. Misalnya, pertama, memahami bagaimana pengendalian terhadap seksualitas dan pembentukan sosial. Kedua, sejauh mana terhadap pembagian kerja dan akses serta kontrol di ketenagakerjaan, hak milik, pengetahuan, dan posisi kekuasaan yang bertumpu pada gender.” (wawancara 20 September 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa saat perempuan telah memiliki sebuah kesadaran dan pengetahuan yang cukup maka ia akan memiliki sikap yang mandiri. Perempuan perlu memiliki semangat yang seperti itu, karena mengejar ketertinggalan perempuan diberbagai ranah publik. Dimana perempuan diberikan sebuah kedudukan dan peran yang *balance*.

Tindakan kesadaran gender ini diarahkan untuk mendorong perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik antara membina keluarga, mencari nafkah dan pelaku pembangunan. Sebuah tindakan kesetaraan gender dapat dilakukan di organisasi sebagai langkah awal untuk menanamkan kesensitifan gender. Hal yang dapat dikonstruksikan di dalam organisasi perempuan yaitu khususnya KOHATI terhadap kadernya disampaikan oleh Suci,

“Untuk mewujudkan sebuah kesetaraan gender itu harus dibentuk dari diri sendiri. Pada internal kader HMI-Wati memfokuskan diri yaitu kualitas intelektual secara pengetahuan, Intelektual dan bijaksana. Memiliki Kemampuan kepemimpinan

yang *Uswatun Hasanah*, artinya pemimpin yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi antar anggota dan di luar anggota, mampu berbicara dikhalayak umum, mampu menjalin hubungan baik dengan menerapkan etika sopan santun. kemampuan manajerial, di kemampuan ini memiliki pengetahuan manajerial yang luas yang meliputi *planning, organizing, Actuating, and controlling* untuk mengatur roda organisasi dimulai memahami administrasi, mengelola keuangan. Kemandirian, artinya HMI-Wati memiliki kemampuan mengelola rasa emosional, spiritual dan mental yang berkaitan dengan kemandirian pribadi dan ekonomi” (wawancara 15 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa secara tindakan praktis di dalam menanamkan kesetaraan gender itu dimulai diri sendiri, maka di dalam organisasi ini ditujukanlah pada pengkualitasan diri seperti kualitas pengetahuan, kualitas intelektual, *wisdom*, memiliki sebuah kemampuan memimpin yang *uswatun hasanah*, dan kemampuan manajerial.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa konstruksi pengurus KOHATI menganggap kesetaraan gender merupakan hal penting dan harus diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konsep dasar gender, menempatkan perempuan dan laki-laki adalah kedudukan yang sama. artinya, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu adalah sama. sama-sama memiliki sebuah kesempatan yang sama dalam mengekspresikan dirinya, selain memberikan hak untuk bereskrepsi juga memberikan ruang yang dapat bertukar peran di ruang publik. Sesuai dengan ajaran agama (Surat *Al-Baqarah* ayat 30), *khalifah* di muka bumi itu tidak mengidentifikasi seks maka laki-laki dan perempuan adalah sama di dalam dunia publik.

Pengurus KOHATI Badko Jatim juga secara sadar bahwa konsep dasar gender di dalam masyarakat tidak diimplementasikan dengan maksimal. Karena pengurus KOHATI Badko Jatim memandang bahwa masyarakat masih berpandangan patriarkhi dalam mengonstusikan perempuan dalam memilih dan dipilih menjadi seorang pemimpin. Pengurus KOHATI badko Jatim melihat bahwa pelabelan di dalam masyarakat karena hasil budaya patriarkhi terhadap perempuan, yang menganggap perempuan di dalam mengambil keputusan cenderung mempertimbangkan rasa daripada logika. Selain itu, perempuan dianggap tidak tegas dan lemah maka kurang kuat jika di bawah tekanan saat perempuan menjadi seorang pemimpin.

Dampak pandangan budaya patriarkhi yang signifikan kepada perempuan mengunggah adanya suatu gerakan kesetaraan gender pada beberapa kalangan khususnya kalangan organisasi perempuan. Dengan adanya suatu strategi dalam pemecahan masalah dan juga pemberian

edukasi kepada masyarakat terkhusus perempuan sendiri. Salah satu organisasi keperempuanan yang ada di Perguruan Tinggi adalah Koprs HMI-Wati (KOHATI).

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger mengungkapkan tiga proses secara simultan yaitu *eksternalisasi* (penyesuaian individu terhadap dunia sosiokultural), *objektivasi* (proses interaksi sosial dalam individu-individu yang dilembagakan atau mengalami proses institusional) dan *internalisasi* (proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi).

Pada tahap pertama adalah *eksternalisasi* menjelaskan bahwa di dalam proses mengekspresikan diri manusia dalam membangun tatanan kehidupan, atau bisa diartikan sebagai proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya. Di dalam proses ini, manusia merupakan pencipta dari sebuah kenyataan sosial yang bersifat obyektif. Berger di proses eksternalisasi mencoba untuk memisahkan antara pengetahuan dan kenyataan. dikaitkan dengan konteks kesetaraan gender maka seorang individu mempunyai sebuah pengetahuan, pengalaman dan intuisi tentang konsep dasar gender dan kesetaraan gender yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Pada tahap pertama ini pengurus KOHATI Badko HMI Jatim Periode 2018-2020 telah mampu memahami konsep dasar gender dan kesetaraan gender. Pengurus KOHATI Badko Jatim menganggap bahwa gender adalah konsensus dari masyarakat untuk telah mampu memberikan sebuah peran biologis perempuan dan laki-laki serta kodrat yang sering dicampur adukkan dengan gender.

Pengurus KOHATI pun memahami akar mula interpretasi dari pembagian kerja yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. pembagian kerja secara seksual yang bersumber sumber cara dulu mendapatkan sebuah makanan. Kegiatan berburu yang hampir dari sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, berbeda dengan perempuan yang bergantung pada laki-laki. Selain itu, terdapat sumber pembagian kerja secara simbolik antara perempuan dan alam (*nature*) serta laki-laki dan budaya (*culture*). Penempatan perempuan yang diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki yang di lingkungan publik sehingga berdampak kepada pandangan superior terhadap laki-laki. Hal ini juga mengunggah sebuah konsep kesetaraan gender untuk memberikan sebuah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Pengurus KOHATI Badko juga sepatat dan mengetahui baik secara ilmiah dan juga secara nilai agama atau ajaran agama terkait dengan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama kecuali ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan adanya pembatasan ruang aktivitas dan kreatifitas perempuan seperti ini memang

berdampak kepada psikis dan fisik perempuan. Maka dalam proses eksternalisasi ini merupakan fakta antropologis yang mendasar dan sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis manusia.

Kedua, pada tahap *objektivasi* merupakan sebuah proses menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dengan subjektivitasnya. Hal ini terjadi pada dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Pada proses ini di dalam penelitian merupakan bentuk kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam konteks kepemimpinan. Kesadaran gender pun di sini dimulai dari hak antara laki-laki dan perempuan yang dapat dikemukakan bahwa pengurus KOHATI menjelaskan bahwa hak antara laki-laki dan perempuan pada lingkup publik adalah sama. Hak yang sama-sama harus diperjuangkan dan diisi oleh sesama, baik itu dimata sosial, ekonomi, politik dan hukum. serta pada ruang kepemimpinan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, sedangkan pada sisi kesempatan dikembalikan kepada kualitas dan kapabilitas masing-masing individu.

Sebagai organisasi yang bergerak pada bidang keperempuanan, maka tuntutan kepada kesetaraan gender perlu diimplementasikan minimal dalam menjalankan roda organisasi dan mendapatkan sebuah pengetahuan terkait dengan konsep dasar gender dan juga kesetaraan gender. Pada ranah kepemimpinan organisasi KOHATI, terdapat sebuah musyawarah dalam pemilihan ketua tanpa adanya campur tangan laki-laki dalam forum tersebut walaupun KOHATI termasuk badan semi otonom dari HMI.

Proses ketiga adalah internalisasi yang merupakan proses nilai-nilai general atau realitas objektif dipelajari kembali oleh individu dan dijadikan sebageian dari hidupnya. Hal ini menyangkut indentifikasi diri individu ke dalam realitas objektif untuk mencapai taraf tersebut maka seorang individu harus berinterksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, manusia yang membentuk masyarakat dipandang sebagai suatu dialektika antara data dan makna subjektif. Di dalam proses internalisasi pada penelitian ini dapat dikemukakan sebuah tindakan praktisnya dalam kesetaraan gender.

Di dalam proses internalisasi yang merupakan sebuah tindakan praktis ini menunjuk tindakan secara internal sebagai proses pemberdayaan perempuan untuk mengkualitaskan dan kapabilitas seorang kader. Dengan 1) mengkualitaskan intelektual secara *knowledge, intellectuality, wisdom*, 2) kemampuan memimpin *Uswatun Hasanah* artinya adalah memimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi antaranggota dan diluar anggota, mampu public speaking, dan mampu

menjalin silaturahmi dengan etika sopan santun, 3) kemampuan manajerial merupakan kemampuan yang meliputi *planning organizing, actuating dan controlling* dalam menjalankan organisasi termasuk dalam administrasi dan *budgeting*, 4) kemandirian artinya di sini kader dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola rasa emosional, spiritual dan mental yang berkaita dengan pribadi dan ekonomi.

Kegiatan untuk mencapai tujuan pengkualitaskan diri seperti *pertama*, forum LKK pada tingkatan Badko hanya memberikan suatu back up edukasi dan juga memberikan stimulus kepada kader yang belum melakukan LKK. *Kedua*, Up Grading yang bertujuan memberikan stimulus kepada kader terkait dengan KMO (Kepemimpinan, Manajemen dan Organisasi). *Ketiga*, Pra nikah adalah kegiatan untuk mempersiapkan kader dalam menghadapi pernikahan sehingga mampu mengelola perannya baik. Keempat, Latihan Kader Sensitif Gender (LKSG) yang bertujuan memberikan pemahaman kepada kader tentang gender, analisis dinamika gender dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan perempuan di kancan nasional. Keempat, strategi advokasi dan kebijakan hukum persoalan yang merupakan pemahaman dasar soal advokasi isu perempuan dan anak dengan *framing dan reframing*, advokasi dan bantuan hukum, advokasi media, strategi *hearing*, strategi *healing*.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi kesetaraan gender menurut pengurus KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020 adalah sebuah hak dan peranan yang sama di ruang publik dan juga domestik. Hak dan peranan antara laki-laki dan perempuan tersebut juga tidak boleh melanggar, lupa dan berseberangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam yang biasanya disebut dengan kodrat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger menjabarkan, Pertama, secara pengetahuan dasar makna gender dan kesetaraan gender pengurus KOHATI memahami makna gender dan kesetaraan gender. Pada kesetaraan gender ini membahas terkait dengan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pengurus KOHATI Badko HMI Jatim pun menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama dalam mitra dan dalam agama (kodrat). Konteks kodrat perempuan di dalam pandangan KOHATI yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi pembeda antara inferior dan superior.

Kedua, secara kesadaran kesetaraan gender. Kesadaran gender dalam sisi kepemimpinan pengurus

KOHATI Badko HMI Jatim menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Pengurus KOHATI pun telah memahami secara sadar bahwa terdapat sebuah label sifat kepemimpinan laki-laki dan perempuan dari masyarakat secara budaya. Namun, di roda pengorganisasian KOHATI tetap mengiktiarkan pengkualitaskan kepada kader yaitu terdapat forum dalam pemilihan ketua yang tidak terdapat campur tangan laki-laki.

Ketiga, tindakan praktis untuk menyadarkan kesetaraan gender di dalam internal KOHATI. Proses penyeteraan gender yang diimplementasikan dan dikumangkan bukan untuk menginjak laki-laki, tetapi lebih kepada *equality* (keadilan) bukan kesamaan (*sameness*). Terdapat beberapa tindakan praktis yaitu Dengan 1) mengkualitaskan intelektual secara *knowledge, intellectuality, wisdom*, 2) kemampuan memimpin *Uswatun Hasanah*, 3) kemampuan manajerial merupakan kemampuan yang meliputi *planning organizing, actuating dan controlling* dalam menjalankan organisasi termasuk dalam administrasi dan *budgeting*, 4) kemandirian artinya di sini kader dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola rasa emosional, spiritual dan mental yang berkaitan dengan pribadi dan ekonomi.

### Saran

Berdasarkan penjabaran saat mengumpulkan data dan mengelola data, maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan tertuju pada pembaca, Kader KOHATI dan Kader HMI dan aktivis perempuan adalah sebagai berikut: (1) Bagi pembaca, penelitian ini merupakan penelitian dasar tentang konstruksi kesetaraan gender dalam pengurus KOHATI Badko HMI Jatim periode 2018-2020. Oleh karena itu, perlu adanya riset-riset yang berkelanjutan untuk membahas sub topik dalam setiap pembahasan penelitian ini, (2) bagi kader KOHATI dan kader HMI saling berkolaborasi dalam setiap aktivitas yang menunjang tujuan pengkualitaskan diri kader dan juga eksistensi organisasi, (3) aktivis perempuan, dalam penelitian masih perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga yang memang bekerjasama dengan dengan aktivis perempuan. karena di dalam KOHATI terdapat suatu kegiatan yang cukup banyak dan masing-masing kegiatan selalu berhubungan dengan keintelektualan dan pemahaman. Maka dengan adanya kerjasama terhadap aktivis perempuan maka lebih dapat membuka pandangan bukan hanya di KOHATI Badko, namun komisarit hingga ke Pengurus Besar.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 2018

Ardaniah, Tri. 1993. Prespektif Gender sebagai alternative penyusunan program pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Argapura*. Vol. 12 no 2

Black, James A. dan Champion Dean J. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*.Bandung: PT Refika Aditama.

Creswell, John W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Darni. (2012). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Fiksi Jawa Modern: Kajian New Historicism (sebuah kritik sastra)*. Surabaya: PNM Press.

Faarida Hanum. 2018. *Kajian & Dinamika Gender*. Intrans Publishing. Malang, Jawa Timur.

Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fibrianto, 2016. Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1) :10-27

Gilman, Charlotte Perkins. (2008). *The dependence of Women in social Theory (edited by Peter Kivisto)*. New York:Oxford University Press.

Pengurus Besar Himpunan Mahaiswa Islam, 2018. *Hasil-hasil kongres HMI Ambon ke XXIII tahun 2018*

Hidayati, Rahma. 2018. Gender dan Gaya Perempuan di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Community*. Vol. 4 no 2 hal 66

Hungu. 2007. *Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.

Ihromi. T.O. 1995. *Pengguna Hukum Sebagai Alat Dalam Upaya Perbaikan Kedudukan Wanita, Dalam Ihromi* (Ed). Yayasan Obor Indonesia.

Muchtar, Yanti. 2016. Pendidikan Alternatif untuk Perempuan. Jakarta: *Jurnal Perempuan*.

Lips, Hilary M., 1993, *Sex & gender and Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publising Company.

Makhfudz Muhammad, 2011. Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. 506-509.

Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Graffindo Persada

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja

Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and Anthropology*. Minnesota: University of Minnesota Pres..

- Moose, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*.  
Pend. Hartian Silawati. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender; Buku Kedua*.  
Magelang: Indonesia Tera.
- Santoso. Widjajanti.M. 2016. *Penelitian dan  
Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*.  
Jakarta: LIPI Press, anggota Ikapi.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and  
Evaluation Methods*. 3rdEdition. Thousand Oaks.  
Sage Publications. Inc. California.
- Koprs HMI-WATI (KOHATI) Pengurus Besar  
Himpunan Mahasiswa Islam periode 2018-2020.  
2018. *Pedoman Dasar KOHATI* Musyawarah  
Nasional ke-XXIII Ambon
- Puspitawati, Herien. 2018. Presepsi Peran Gender  
Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik pada  
mahasiswa IPB. *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol.5  
No.1 halaman 17-34.
- Qomariah, Dede. 2019. Persepsi Masyarakat Mengenai  
Kesetaraan Gender dalam Keluarga. *Jurnal  
Cendekiawan Ilmiah*. Vol. 4 No 2 halaman 14.
- Rakmawati, Ika. 2003. *Modul Analisis Gender*. Jakarta:  
The Asia Foundation.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto:  
PGS STAIN Purwokerto bekerja sama dengan Fajar  
Pustaka Yogyakarta Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*,  
Jakarta: PT . Raja Graffindo Persada.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  
dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutjipto, Ani. W. 2000. *Hak politik Wanita Indonesia  
dalam Penghampusan Diskriminasi Terhadap Wanita*  
(T.O. Ihromi ed). Bandung:Alumni..
- Suwanda Made, dkk. 2016. *Pendidikan  
Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*.  
Surabaya: Unesa University Press.